

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Analisis Situasi

Kementerian Pekerjaan Umum mempunyai peranan penting dan strategis dalam menyediakan infrastruktur bidang pekerjaan umum yang berfungsi mendukung pertumbuhan dan perkembangan berbagai bidang. Penyediaan infrastruktur bidang pekerjaan umum harus melalui proses penyelenggaraan pekerjaan konstruksi meliputi tahap perencanaan pekerjaan konstruksi, pelaksanaan beserta pengawasan pekerjaan konstruksi, dan operasi serta pemeliharaan. Penyelenggaraan pekerjaan konstruksi oleh Kementerian Pekerjaan Umum dalam menyediakan infrastruktur bidang pekerjaan umum harus memenuhi ketentuan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi dan Peraturan Pelaksanaannya yang menyatakan bahwa penyelenggara pekerjaan konstruksi wajib mewujudkan hasil pekerjaan konstruksi yang handal dan bermanfaat dengan memenuhi ketentuan tertib penyelenggaraan pekerjaan konstruksi.

Di Kabupaten Jember, fungsi Kementerian Pekerjaan Umum dijalankan oleh Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga khususnya dalam bidang jalan dan jembatan. Guna memperlancar dan memelihara kenyamanan arus transportasi barang dan orang, setiap tahun anggaran Dinas PU Bina Marga Kabupaten Jember mengalokasikan dana yang cukup besar yang diwujudkan dalam paket-paket pekerjaan fisik, berupa pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan baik untuk jalan maupun jembatan. Perencanaan dan pengawasan pekerjaan fisik dilakukan sendiri oleh Dinas PU Bina Marga (swakelola), sedang untuk pelaksanaan pekerjaan diserahkan kepada pihak penyedia jasa (kontraktor).

Untuk memperoleh hasil suatu pekerjaan fisik bangunan tertentu yang sesuai standar dan dapat dipertanggungjawabkan, maka perlu dilakukan kegiatan pengawasan pelaksanaan dan pengendalian mutu pekerjaan yang meliputi pemilihan bahan, pengujian berkala, cara pelaksanaan, perawatan, dan pemeliharaan yang baik dan benar khususnya dalam pekerjaan jalan dan jembatan.

Sementara itu pihak Dinas PU Bina Marga Kab. Jember masih merasakan banyak kelemahan dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan dan pengendalian pekerjaan fisik di lapangan, serta dalam administrasi pelaporan. Hal ini dikarenakan utamanya tingkat pendidikan dan pengetahuan dalam bidang struktur yang belum seragam.

Dinas PU Bina Marga Kab. Jember membawahi 14 Unit Pelaksana Teknis (UPT), masing-masing UPT meliputi 2-3 kecamatan. Kepala UPT membawahi 3 orang Pengamat dan staf Teknis. Pengamat dan staf Teknis inilah yang dilibatkan dalam kegiatan pengawasan pekerjaan yang dilaksanakan oleh para Kontraktor. Pengawas dituntut mempunyai kemampuan yang cukup dalam bidang teknis jalan maupun kemampuan administratif, karena seorang pengawas diberi tugas untuk mengawasi 2-3 Kontraktor.

Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Jember berinisiatif untuk memperbaiki kelemahan-kelemahan tersebut dengan memberi pengetahuan dan wawasan teknis yang perlu untuk dimiliki seorang pengawas pekerjaan fisik. Oleh karena itu pada pelaksanaan kegiatan tahun ini dilakukan melalui “Bimbingan Teknis Pengawasan Proyek dengan Tema : Dengan Peningkatan Profesionalitas Pengawas Untuk Mencapai Kualitas Proyek Yang Maksimal & Akuntabel (Prima)”.

Untuk melaksanakan program Bimbingan Teknis ini Dinas PU Bina Marga Kab. Jember melakukan kerja sama dengan Jurusan Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Jember. Pelaksanaan program bimbingan teknis dilaksanakan selama dua hari, dimana Jurusan Teknik Sipil menugaskan satu tim pengabdian yang terdiri dari empat orang dosen berpengalaman dan satu orang teknisi laboratorium.

1.2 Perumusan Masalah

Pengetahuan dan wawasan teknis apa yang harus dimiliki oleh pengawas dari Dinas PU Bina Marga dalam Bidang Pelaksanaan Dan Pengawasan Pekerjaan Fisik?

